OMBUDSMAN RI KALSEL DUKUNG LAYANAN ADMINDUK BERBASIS DIGITAL

Kamis, 12 Desember 2024 - kalsel

Banjarbaru-Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan urgensi pencegahan Maladministrasi melalui layanan digitalisasi Administrasi Kependudukan, dalam kegiatan Sosialisasi Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kota Banjarbaru. Bertempat di Aula Gawi Sabarataan Pemerintah Kota Banjarbaru pada Kamis (12/12/2024). Kegiatan sosialisasi dibuka langsung oleh Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin, dan diikuti oleh seluruh Camat, perwakilan Kelurahan, dan tokoh masyarakat di Kota Banjarbaru.

Dalam penyampaiannya sebagai narasumber, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan Benny Sanjaya menekankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital, penting dan berperan dalam mencegah terjadinya potensi Maladministrasi. "Dengan layanan yang dapat diakses langsung melalui gawai, maka akan mengurangi layanan tatap muka yang berdampak terhadap pencegahan potensi Maladministrasi Permintaan Uang dalam bentuk pungutan. Selain itu, layanan IKD memungkinkan kita dapat mengakses layanan tanpa harus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ini akan mempermudah akses pelayanan mencegah Maladministrasi tidak memberikan pelayanan. Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital, memungkinkan kita memiliki backup data, terhadap resiko kehilangan. Mari kita dukung target capaian IKD di Kota Banjarbaru," kata Benny.

Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin, menyampaikan pentingnya dukungan transformasi pelayanan publik menuju arah digital. "Di masa saat ini, kecepatan dan kemudahan layanan melalui akses digital sangat diperlukan, mengikuti perkembangan era teknologi digital, Kota Banjarbaru telah mendapat penghargaan nasional, sebagai salah satu kota dengan capaian cakupan layanan E-KTP tertinggi di Indonesia, saya mengapresiasi kinerja dari Disdukcapil Banjarbaru, dan terimakasih atas dukungan Ombudsman RI Kalsel. Kami berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada masyarakat," ucap Aditya.

Pada kesempatan yang sama dilakukan juga penandatanganan fakta integritas bersama stake holder terkait penyelenggara Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta dilakukan diskusi bersama, antara para peserta yang hadir dengan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, selaku penyelenggara kegiatan sosialisasi penerapan Identitas Kependudukan Digital.